



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN**

**RUMUSAN
PERTEMUAN KOORDINASI
PROGRAM PERBAIKAN PERIKANAN NASIONAL TAHUN 2023**

Jakarta, 13 Juni 2023

Pertemuan Koordinasi Program Perbaikan Perikanan Nasional dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2023. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi perkembangan, tantangan, dan rencana tindak lanjut Program Perbaikan Perikanan.

Pertemuan dibuka oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang diwakili oleh Kasub Pokja Tata Kelola Sumber Daya Ikan, Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak, yaitu perwakilan dari:

1. Biro Perencanaan,
2. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri,
3. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,
4. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
5. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan,
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB,
7. FPIK IPB University,
8. FPIK Universitas Brawijaya,
9. Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (FIP2B) Provinsi NTB,
10. Komite Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap Berkelanjutan (KP2K2B) Provinsi NTB,
11. UNDP,
12. UNDP-ATSEA Indonesia Project,
13. Asosiasi Pengelola Rajungan Indonesia,
14. Asosiasi Demersal Indonesia,
15. Sustainable Fisheries Partnership,
16. Marine Stewardship Council Indonesia,
17. Yayasan WWF Indonesia,
18. Yayasan Pesisir Lestari,
19. Yayasan JARI,
20. Yayasan IPNLF Indonesia,
21. Yayasan MDPI,
22. Yayasan LINI,
23. Yayasan Konservasi Alam Nusantara,
24. Yayasan Coral Triangle Center,
25. Yayasan Rekam Nusantara,

26. PT Pahala Bahari Nusantara,
27. PT Sekar Laut,
28. PT Cassanatama Naturindo,
29. PT Karya Kencana Sumber Sari,
30. PT Agrita Seafood,
31. PT Aruna Indonesia,
32. PT Sahabat Laut Lestari,
33. North Atlantic Seafood Indonesia,
34. The Happy Seafood Co limited,
35. Fish for Good Squid FIP Team, dan
36. Dr. Adrian Gutteridge, MSC Science and Standard

Pertemuan ini menghasilkan rumusan sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan kebijakan *blue economy*, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan program Penangkapan Ikan Terukur dan Kampung Nelayan Maju (KALAJU) untuk memperbaiki pengelolaan perikanan tangkap dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.
2. Standar perikanan MSC telah diubah dari MSC Versi 2.0 menjadi MSC versi 3.0 dan diterapkan sejak 1 Mei 2023. Standar ini digunakan dalam proses sertifikasi MSC utamanya untuk perikanan yang baru memulai sertifikasi. Perikanan yang sudah melakukan sertifikasi sebelum MSC versi 3.0 diterapkan, dapat menggunakan standar sebelumnya hingga masa berlaku sudah habis.
3. Perkembangan pengelolaan perikanan udang di Kalimantan Selatan dengan Lembaga pelaksana PT. Sekar Laut adalah sebagai berikut:
 - a. Saat ini sudah ada konsorsium tiga perusahaan untuk penerapan pengelolaan perikanan udang di Kalimantan Selatan, yaitu PT. Sekar Laut, PT. Cassanatama Naturindo, dan PT. Karya Kencana Sumber Sari;
 - b. Tantangan pada perikanan udang adalah proses pendaftaran TDKP yang membutuhkan waktu lama namun memiliki jangka waktu satu tahun menyebabkan saat izin baru didapatkan, perlu segera diperbaharui kembali;
 - c. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah peningkatan penggunaan logbook yang disederhanakan menjadi *e-logbook* melalui koordinasi bersama lembaga terkait untuk kelengkapan berkas; dan mendorong penyusunan RPP, *harvest strategy*, dan *harvest control rule* udang.
4. Perkembangan pengelolaan perikanan cumi-cumi di Sumatera Utara dengan Lembaga pelaksana FPIK IPB adalah sebagai berikut:
 - a. Proses penelitian stok target, habitat dan lingkungan serta pengkajian stok sedang dilakukan dan dalam proses penyelesaian,
 - b. Tantangan pada perikanan cumi-cumi adalah kurangnya data runut waktu sehingga proses pengkajian stok dan analisisnya memerlukan waktu lebih lama dan riset yang lebih detail,
 - c. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), *harvest strategy*, dan *harvest control rule* terkait cumi-cumi.

5. Perkembangan pengelolaan perikanan kakap dan kerapu di Teluk Saleh dengan lembaga pelaksana KP2K2B Provinsi NTB adalah sebagai berikut:
 - a. Saat ini telah dilakukan pre-assessment, penyusunan rencana aksi, implementasi rencana aksi hingga tahun 2024 dan sudah bergabung dalam FisheryProgress.org.
 - b. Tantangan yang dihadapi diantaranya adalah kondisi status stok yang masih berada di zona kuning, sinergi untuk menanggulangi praktik penangkapan yang merusak, serta sinergi untuk melakukan kajian ilmiah dan menghimpun informasi pendukung.
 - c. Rencana berikutnya akan dilakukan monitoring evaluasi rencana aksi pada tahun 2024, mengembangkan analisis MERA dengan skenario tertentu agar lebih responsive terhadap peningkatan biomassa dan yield, meningkatkan kapasitas FIP2B dan stakeholders yang lebih luas dalam analisis stok perikanan.
6. Perkembangan pengelolaan perikanan tuna dengan lembaga pelaksana AP2HI, YII, dan MDPI adalah sebagai berikut:
 - a. Perikanan tuna WCPO sudah tersertifikasi dan saat ini terus dilakukan penilaian untuk memperbaharui kondisi perikanan tuna di WCPO,
 - b. Tantangan yang dihadapi pada perikanan tuna adalah penerapan *harvest strategy* yang harus sejalan dengan *harvest strategy* yang diterapkan pada RFMO. Selain itu juga pengelolaan ETP berada pada nilai ambang batas, sehingga perlu kehati-hatian dalam pengelolaannya.
 - c. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melakukan pendataan dan pemasangan alat monitoring untuk peningkatan pendataan ETP; meningkatkan pengumpulan data untuk mendukung *harvest strategy*; dan melakukan upaya peningkatan kerjasama antara berbagai pihak.
 - d. Tindak lanjut lainnya adalah akan dilakukan diskusi terkait *pre assessment* dan kolaborasi dengan penggiat FIP Tuna di perairan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
7. Perkembangan pengelolaan perikanan tuna dengan lembaga pelaksana ATLI adalah sebagai berikut:
 - a. Perikanan tuna saat ini sedang dilakukan upaya peningkatan kapasitas kaptan kapal dalam pengelolaan ETP,
 - b. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah meneruskan dukungan dalam penyusunan *harvest strategy* dan *harvest control rule*.
8. Perkembangan pengelolaan perikanan cakalang dan madidihang di Kendari dengan lembaga pelaksana PT Pahala Bahari Nusantara adalah sebagai berikut:
 - a. Saat ini dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penempatan *observer on board* dan analisis data.
 - b. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mempertimbangkan akan melakukan *full assessment* pada perikanan cakalang dan madidihang.
9. Perkembangan pengelolaan perikanan rajungan dengan lembaga pelaksana APRI adalah sebagai berikut:
 - a. Pendataan rutin terus dilakukan untuk analisis pendugaan stok dan dilaksanakan rencana pengelolaan untuk menjaga keberlanjutan rajungan,

- b. Tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya nilai SPR di beberapa lokasi, pembentukan kawasan konservasi rajungan membutuhkan waktu yang lama, dan masih rendahnya penegakan hukum dalam perikanan rajungan.
 - c. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan semua pihak dalam penerapan *harvest strategy* rajungan yang sudah ditetapkan dan mendorong peningkatan penegakan hukum dalam pengelolaan perikanan rajungan.
10. Perkembangan pengelolaan perikanan rajungan di Kalimantan Timur dengan lembaga pelaksana PT Aruna adalah sebagai berikut:
 - a. Perikanan rajungan di Kalimantan Timur saat ini sudah dilakukan proses *pre-assessment*,
 - b. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyampaian hasil *pre-assessment* dan rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan di Kalimantan Timur.
11. Perkembangan pengelolaan perikanan kakap dan kerapu di WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718 dengan lembaga pelaksana Asosiasi Demersal Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Pendugaan status stok sudah dilakukan untuk perikanan kakap merah di beberapa lokasi dan sudah dilakukan penyusunan *harvest strategy* di WPPNRI 713,
 - b. Tantangan yang dihadapi adalah sulitnya menentukan lokasi prioritas karena luasnya area dan banyaknya spesies kakap dan kerapu yang harus dikelola,
 - c. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melakukan kegiatan riset untuk mengetahui estimasi stok dengan SPR dan merancang program yang dapat meningkatkan kepatuhan.
12. Perkembangan pengelolaan perikanan kepiting bakau di Provinsi Maluku dengan lembaga pelaksana Yayasan WWF Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Pendugaan status stok sudah dilakukan untuk spesies *Scylla serrata* dan *S. olivacea*.
 - b. Tantangan yang dihadapi adalah belum adanya pembuktian terkait keberadaan ETP dalam perikanan ini, belum adanya entitas pemegang sertifikat untuk proses sertifikasi MSC, dan terbatasnya pendanaan dalam proses pengelolaan kepiting bakau di Teluk Hoat Sorbay.
 - c. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah konsultasi publik dengan pemangku kepentingan terkait di Teluk Hoat Sorbay dalam rangka penyusunan *harvest strategy* dan *harvest control rule* yang saat ini sedang disusun; dan kajian terkait dampak alat tangkap terhadap habitat dan ekosistem.
13. Perkembangan pengelolaan perikanan demersal laut dalam di WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 718, dan WPPNRI 573 dengan lembaga pelaksana Yayasan Konservasi Alam Nusantara adalah sebagai berikut:
 - a. Telah dilakukan pengkajian stok dengan hasil sebagian besar spesies telah berada pada status *over-exploited*; dan telah dilakukan penyusunan *harvest strategy* di WPPNRI 573 dan saat ini dalam proses legalisasi,

- b. Tantangan yang dihadapi adalah adanya isu terkait *shark finning* dalam perikanan demersal ini.
 - c. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah memperkuat kemampuan identifikasi komposisi spesies tangkapan di level nelayan.
14. Perkembangan pengelolaan perikanan demersal laut dalam di Laut Banda dengan lembaga pelaksana Yayasan CTC adalah sebagai berikut:
- a. Sudah dilakukan survey awal untuk pengumpulan data perikanan demersal laut dalam di Laut Banda,
 - b. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melanjutkan proses pengumpulan data hingga Desember 2023.
15. Perkembangan pengelolaan perikanan gurita di Sulawesi dengan lembaga pelaksana Yayasan Pesisir Lestari adalah sebagai berikut:
- a. Sudah dilakukan *launching* perbaikan pengelolaan gurita di awal tahun 2023 dan dilanjutkan dengan pendataan secara sensus di semua lokasi targetnya,
 - b. Tantangan yang dihadapi adalah perlunya kolaborasi untuk mendorong pengelolaan perikanan gurita di Indonesia dan belum adanya *private sector* yang berkomitmen mendukung perbaikan pengelolaan gurita.
 - c. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melakukan pendugaan stok setelah data yang dikumpulkan mencukupi untuk dilakukan pendugaan stok, dan mendorong penyusunan RPP Gurita
16. Perkembangan pengelolaan perikanan udang di Jawa Tengah dengan lembaga pelaksana PT Cassanatama Naturindo adalah sebagai berikut:
- a. Saat ini masih dilakukan koordinasi dan peninjauan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam proses perbaikan pengelolaan udang di Jawa Tengah,
 - b. Tantangan yang dihadapi adalah belum adanya metode yang disepakati dalam pendugaan stok udang putih di Jawa Tengah,
 - c. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah pembentukan pokja perikanan udang di Jawa Tengah; mendorong penyusunan RPP, *harvest strategy*, dan *harvest control rule* udang di Jawa Tengah; dan mendorong udang menjadi perikanan prioritas di WPPNRI 712.
17. Perkembangan pengelolaan perikanan udang di Kalimantan Selatan dengan lembaga pelaksana PT Karya Kencana Sumber Sari adalah sebagai berikut:
- a. Saat ini masih tahap awal dalam penyusunan rencana perbaikan pengelolaan perikanan udang,
 - b. Tantangan yang dihadapi adalah perlunya mitra baik dari peneliti, NGO, ataupun akademisi dalam pelaksanaan perbaikan pengelolaan perikanan udang,
 - c. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan rencana perbaikan pengelolaan perikanan udang.

18. Beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan didiskusikan lebih lanjut diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Kebijakan *fin naturally attach* (FNA) pada perikanan yang terkait dengan *shark finning*;
 - b. Kebijakan terkait *Marine mammals protection act* (MMPA);
 - c. Sumber pendanaan untuk mendukung Program Perbaikan Perikanan; dan
 - d. Perlunya pengakuan yang lebih baik seperti insentif dalam perikanan tuna SSF yang sudah tersertifikasi.

19. Program perkembangan perbaikan pengelolaan di masing-masing lokasi secara mendetail dapat dilihat pada notulensi terlampir.